



KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho

HARI PELANGGAN NASIONAL: Sejumlah penari menampilkan tarian Gambyong Pareanom di Ruang Tunggu Keberangkatan Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (4/9/2024). Pertunjukan seni tari yang digelar PT Angkasa Pura I Bandara Adi Soemarmo pada Hari Pelanggan Nasional 2024 itu sebagai bentuk terima kasih kepada pengguna jasa angkutan udara.

JELANG PENUTUPAN SELEKSI CPNS

Pendaftar Keluhkan E-Materai

YOGYA (KR) - Menjelang batas akhir atau penutupan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 pada 6 September besok, banyak pendaftar yang mengalami kesulitan dan mengeluh belum bisa mendaftar. Hal itu disebabkan mereka tidak bisa menyertakan e-materai sebagai bagian dari persyaratan pendaftaran.

Padahal e-materai tersebut menjadi salah satu syarat wajib bagi calon pellar. Karena mereka yang ingin mendaftar CPNS harus mengirimkan sejumlah dokumen yang dibubuhkan e-materai, untuk memastikan dokumen tersebut sah dan sesuai persyaratan.

Seperti diungkapkan seorang pendaftar CPNS di DIY Suryo, Rabu (4/9), yang mengaku mengalami kesulitan saat mendaftar karena terkendala e-materai. Menghadapi batas

akhir pendaftaran yang semakin dekat (6 September) menjadikan Suryo semakin waswas dan bingung. Karena itu ia berharap Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS dapat mengeluarkan solusi secepat mungkin untuk mengatasi persoalan tersebut.

Selain itu, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) juga dapat mempercepat proses perbaikan agar para pendaftar bisa segera melengkapi berkas pendaf-

taran. Menanggapi keluhan seperti itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY Amin Purwani mengatakan, BKD DIY sedang berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Petugas sedang mencari solusi dan mengecek agar instansi yang bisa memberikan akses e-materai bisa digunakan.

Menurutnya, waktu pendaftaran masih tersisa dua hari sehingga masih ada waktu bagi pendaftar.

"Berdasarkan informasi terbaru yang kami diterima (BKD DIY), Peruri sedang melakukan top-up ke reseller yang prosesnya masih mengantre. Termasuk PT Pos yang backsend-nya menggunakan Peruri masih dalam antrean. Bisa dicoba sore atau malam hari," terang. **(Ria)-d**

PERINGATAN AMANAT 5 SEPTEMBER

Yogya Sudah Istimewa Sejak Berdiri

YOGYA (KR) - Dalam Amanat 5 September, memang tercantum kalimat bahwa Yogyakarta adalah daerah istimewa. Namun tidak berarti bahwa keistimewaan Yogyakarta berawal dari amanat itu.

"Yogyakarta sudah istimewa sejak berdiri, dan keistimewaan itu diakui juga oleh pemerintah kolonial Belanda dengan memberi status *self desure*, wilayah otonom atau pemerintahan sendiri," kata Sejarawan UGM, Dr Sri Margana MHum.

Jadi kalau dalam Amanat 5 September Sultan HB IX dan Paku Alam VIII menyatakan Daerah Istimewa, lanjut Margana, itu hanya melanjutkan status sebelumnya yang di masa lalu punya hak-hak penuh untuk mengatur segala sesuatunya, kecuali di bidang kemiliteran.

Dikatakan, kalau kita merunut pada kata keistimewaan yang dimaksud Sultan HB IX pada Amanat 5 September, sebetulnya keistimewaan itu tidak hanya lima bidang seperti yang diakui dalam Undang-undang Keistimewaan (UUK) DIY, tapi keseluruhannya. "Termasuk pendidikan, pertanian, agraria, kebudayaan, seni dan sebagainya, hampir semua kecuali di bidang militer," kata Margana.

Tapi dalam perkembangannya, banyak aturan-aturan pemerintah pusat tumpang tindih dengan hak-hak keistimewaan itu, sehingga sebagai wilayah provinsi ada subjek-subjek yang berada dalam kekuasaan republik dan harus tunduk dengan undang-undang pemerintah pusat.

Dengan demikian banyak aturan tentang subjek-subjek yang dulu menjadi bagian keistimewaan pada undang-



KR-Wawan Isnawan
Dr Sri Margana MHum

undang tahun tahun 1950-an, sekarang harus mengikuti pada aturan-aturan pusat dan undang-undang yang baru.

Meskipun demikian, warga Yogyakarta perlu bersyukur bahwa, masih ada lima unsur penting yang diakui dalam Undang-undang Keistimewaan itu, sehingga kita bisa mewujudkannya dengan baik tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

"Kelima unsur yang sekarang diakui itu memiliki akar historis yang kuat, juga berakar pada adat kebiasaan kerajaan Yogyakarta yang kuat, sehingga kalau unsur-unsur itu tidak diakui nanti bisa menimbulkan persoalan-persoalan sosial budaya yang cukup rumit," katanya.

Oleh karena itu, menurut Margana, kita perlu menyambut undang-undang itu sebagai hak kita untuk melaksanakan warisan atau amanah dari para leluhur, untuk bisa melaksanakan aturan-aturan yang berkaitan dengan kelima hal itu, untuk kepentingan ke-

makmuran dan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta.

Hal lain yang mungkin bisa dicatat, digarisbawahi dari Amanat 5 September dan keputusan Sultan IX dan Paku Alam VIII untuk bergabung dengan RI, itu juga dapat dipahami sebagai menyatunya kembali kedua monarki yang dulu dipecah belah oleh Belanda.

Orang Belanda lupa bahwa bagaimanapun Sultan IX dan Paku Alam VIII adalah saudara dan satu keturunan, sehingga jiwa persaudaraan, jiwa kekeluargaan ini tidak bisa dipungkiri.

Oleh karena itu, ketika Paku Alam VIII diajak untuk mengeluarkan Amanat 5 September itu juga menyatakan bahwa tidak ada lagi Pakualaman, tidak ada lagi Kasultanan yang dualistik. Keduanya sudah menjadi satu.

"Namun karena fakta-fakta historis juga tidak bisa dihilangkan tentang eksistensi keduanya, maka di dalam pelaksanaan pemerintahan di bawah republik ini Sultan ditunjuk sebagai gubernur dan Paku Alam sebagai wakil gubernur," katanya.

Memperingati Amanat 5 September, Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY menggelar Sinau Sejarah Keistimewaan DIY Amanat 5 September bertema 'Keistimewaan DIY dalam Bingkai NKRI'.

Sinau Sejarah diadakan Kamis (5/9), pukul 09.00-13.00 di SMA Negeri 1 Prambanan, Sleman, dan akan ditayangkan melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewan DIY. **(Wan)**

DI BEKASI DAN GORONTALO

Tiga Terduga Teroris Ditangkap

JAKARTA (KR) - Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap dua terduga teroris di Bekasi Jawa Barat, Selasa (3/9). Namun tidak diberikan mengenai kronologi maupun identitas terduga teroris yang ditangkap lantaran pemeriksaan tengah berjalan. "Benar (telah melakukan penangkapan). Dua orang," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol Aswin Siregar ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (4/9).

Densus 88 juga mengumumkan telah menangkap seorang terduga teroris berinisial YLK yang terafiliasi kelompok teror Al Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) di Gorontalo. Dalam keterangan pers, Densus 88 menangkap YLK pada pukul 15.29 WITA di Desa Mongoloto Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. YLK pernah berencana melakukan aksi teror terhadap Bursa Efek Singapura pada tahun 2014. Barang bukti menonjol yang diamankan oleh Densus adalah satu lembar buletin dakwah Hizbut Tahrir Indonesia, satu buah paspor atas nama

YLK, dan satu lembar dokumen pemeriksaan imigrasi Singapura.

Berdasarkan penyelidikan Densus 88, diketahui bahwa pada tahun 2012, YLK bergabung dengan kelompok Jamaah Anshor Tauhid (JAT) dan mengikuti program pengiriman personel ke Yaman sebagai bagian dari jihad global AQAP.

Keberangkatan YLK ke Yaman tersebut difasilitasi oleh ABU yang telah ditangkap oleh Densus 88. Pada saat itu, ABU menjabat sebagai Lajnah Roqobah (kaderisasi) kelompok Jamaah Ansharuh Syariah. Ketika di Yaman, YLK mengaku mendapatkan perintah dari petinggi AQAP yang berinisial AM/AZ untuk melakukan aksi teror di Bursa Efek Singapura.

Lalu, pada tahun 2015, YLK mencoba masuk ke Singapura melalui jalur laut, tetapi ditolak oleh imigrasi Singapura dan dideportasi ke Batam. Setelah tahun 2016, YLK berupaya menghilangkan jejak dengan mengganti identitasnya hingga ditangkap pada Agustus 2024.

(Ant/Has)-f

Lebih dari 3,6 Juta Konten Negatif Diblokir

JAKARTA (KR) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memblokir lebih dari 3,6 juta konten negatif di ruang digital dari tahun 2023 sampai 2024.

"Kementerian Kominfo melakukan pengendalian dan penanganan konten negatif melalui pemblokiran konten negatif, khususnya perjudian, sebanyak 3.695.469 konten negatif pada kurun waktu tahun 2023 hingga 2024," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi saat memaparkan capaian ke-

menterian dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (4/9).

Dijelaskan, Kemenkominfo per 1 September 2024 telah memutus akses terhadap lebih dari 3.367.632 konten judi online bekerja sama dengan instansi terkait.

Dalam RDP tersebut ia juga menyampaikan capaian-capaian penting Kemenkominfo selama 2023 hingga 2024 dalam upaya mempercepat transformasi digital di Indonesia. **(Ant/San)-f**

DPN PERADI SIAPKAN 50 SAKSI

LPSK Lindungi 7 Terpidana Kasus Vina

JAKARTA (KR) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada tujuh orang terpidana terkait kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon Jawa Barat. Sementara Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) menyiapkan 50 saksi untuk menguatkan upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan enam terpidana kasus tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon. "Terkait Peninjauan Kembali ini kami siapkan puluhan saksi yang terdiri 30 saksi fakta dan 20 saksi ahli," kata Ketua Umum DPN Peradi Otto Hasibuan di PN Cirebon, Rabu (4/9).

Para saksi, menurutnya, akan dihadirkan pada setiap persidangan PK di PN Cirebon. Hal ini untuk membuktikan dalil-dalil atau novum yang telah ditemukan oleh timnya. Mengenai novum yang dimaksud, merupakan bukti-bukti baru yang belum pernah diungkap dalam persidangan yang dijalani oleh keenam terpidana tersebut pada 2016.

Otto juga mengklaim beberapa novum yang sudah disiapkan dapat memengaruhi

putusan hakim, sehingga para terpidana dapat terbebas dari vonis hukum atas kasus kematian Vina dan Eky. "Jadi, banyak sekali memori PK ini. Namun, yang terutama ada beberapa novum itu adalah bukti-bukti yang baru ditemukan sekarang ini," jelasnya.

Terkait hal ini, LPSK memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada tujuh orang terpidana terkait kasus kematian Vina dan Eki. Para terlingdung yakni RA, ER, HS, ES, JY, SP, dan SD sekarang ini berstatus sebagai saksi dalam kasus pemberian keterangan palsu dan sebagai pemohon PK dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Karena itu, LPSK memberikan layanan program pemenuhan hak prosedural pada seluruh pemohon berupa pendampingan saat pemeriksaan sebagai saksi dalam setiap proses peradilan pidana dan pemohon upaya hukum PK.

"Dan keputusan untuk memberikan program perlindungan itu diputus dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin (2/9)," kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati di Jakarta, Selasa (3/9) malam. **(Full)-d**

RAYAKAN HARI PELANGGAN NASIONAL 2024

BRI Optimalkan Artificial Intelligence Untuk Pelayanan Yang Responsif dan Personal



BRI merayakan Hari Pelanggan Nasional (HPN) dengan semangat inovasi

KR - Istimewa

JAKARTA (KR) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI merayakan Hari Pelanggan Nasional (HPN) dengan semangat inovasi. Dalam perayaan HPN tahun ini BRI mengusung tema "Artificial Intelligence Membuat Pelayanan Pelanggan Lebih Responsif dan Personal", tema ini selaras dengan komitmen BRI dalam mengoptimalkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman perbankan nasabah.

Direktur Utama BRI Sunarso menegaskan komitmen perseroan untuk menyediakan pelayanan terbaik bagi pelanggan. "Kami memahami bahwa di era digital ini, kecepatan dan personalisasi menjadi kebutuhan utama bagi nasabah kami. Oleh karena itu, BRI terus mengembangkan berbagai produk dan layanan yang didukung oleh Artificial Intelligence atau AI, guna memberikan pelayanan yang lebih responsif dan personal." ujarnya.

Merespons tuntutan era digital akan kecepatan dan personalisasi layanan, BRI telah mengembangkan berbagai produk dan layanan berbasis AI. Salah satu produk yang telah menjadi andalan adalah BRImo super apps, yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses berbagai layanan perbankan dengan mudah dan cepat.

Selain itu, BRI juga menyediakan layanan virtual Assistant berbasis AI yaitu "Sabrina" yang siap membantu nasabah kapan saja dan di mana saja dengan solusi yang cepat, tepat dan personal. Inovasi ini merupakan bagian dari strategi BRI untuk memberikan layanan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Sabrina kini dapat diakses melalui WhatsApp di nomor 0812 1214 017 untuk memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan informasi terkait produk dan layanan BRI. Melalui layanan ini, nasabah dapat dengan

mudah menemukan lokasi kantor BRI, ATM dan AgenBRIlink terdekat, serta memperoleh rekomendasi merchant BRI. Selain itu, nasabah juga dapat melakukan pengecekan mutasi rekening dan saldo melalui Chat Banking, serta menyampaikan pengaduan yang dapat dilacak proses penyelesaiannya.

Dengan terus mengadopsi teknologi terkini dan mempertahankan pendekatan layanan yang berfokus pada nasabah, BRI mengukuhkan posisinya sebagai bank terkemuka di Indonesia yang responsif terhadap

kebutuhan nasabah di era digital. Perayaan Hari Pelanggan Nasional ini menjadi momentum bagi BRI untuk menegaskan kembali komitmennya dalam memberikan layanan perbankan terbaik serta memanfaatkan kekuatan AI untuk menciptakan pengalaman perbankan yang lebih personal dan efisien bagi jutaan nasabahnya di seluruh Indonesia.

Sunarso menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh nasabah atas kepercayaan dan kesetiaan yang telah diberikan. "BRI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah BRI atas kesetiaan dan kepercayaan yang diberikan kepada BRI. Kami menyadari bahwa kepercayaan dan kesetiaan nasabah merupakan faktor penting, maka BRI terus berinovasi untuk memastikan bahwa setiap pengalaman nasabah bersama BRI adalah yang terbaik," pungkasnya.

Rayakan Hari Pelanggan Nasional 2024 bersama BRI! Nikmati beragam promo dan penawaran menarik di berbagai merchant. Kunjungi bri.id/hpn24 sekarang dan temukan kejutannya! Selamat Hari Pelanggan Nasional 2024. (*)



Hari Pelanggan Nasional, BRI Optimalkan AI untuk Pelayanan Responsif.

KR - Istimewa



BRI Gandeng AI, Layani Nasabah Lebih Cepat dan Personal

KR - Istimewa